

# ELIT POLITIK ISLAM NASIONAL DAN PENGEMBANGAN PESANTREN DI DAERAH

MOEFLICH HASBULLAH dan M. TAUFIQ RAHMAN

(UIN SGD Bandung, [fikrakoe@uinsgd.ac.id](mailto:fikrakoe@uinsgd.ac.id))

## **Abstract:**

*This study analyzes two political movements, namely from the edge to the middle and from the middle to the edge. That is, how the santri advance to the political arena and how Muslim politicians give to their reference groups, namely the santri group. This study, thus, is a comparison of movements, using the method of action analysis, which investigates the meaning of the movement of social political events. With this method it was found that the santri had gained their political manifestations through various political and social opportunities so that they were in the midst of a vortex of power. Furthermore, it was also found that the existence of the santri in the midst of that power gave them space to make policies that benefited their place of origin, namely the pesantren institution.*

## **Kata Kunci:**

pesantren, gerakan politik, kebijakan pendidikan, Islamisasi

## **I. Pendahuluan**

Untuk memahami fenomena sosial atau dinamika sosial dari sebuah masyarakat diperlukan pemahaman tentang kebudayaannya. Maksud 'kebudayaan' disini diambil dari pengertian yang diberikan Clifford Geertz (1973: 89), yaitu "sebuah pola makna yang ditransmisikan secara historis yang mewujudkan sebagai simbol-simbol, sebuah sistem konsep yang diwariskan dan diekspresikan sebagai bentuk-bentuk simbol melalui mana manusia melakukan komunikasi, mengulang-ngulang dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang bagaimana sikap menghadapi kehidupan."

Sejak setelah masa kemerdekaan sampai tahun 1980an, Indonesia didominasi oleh simbol-simbol kebudayaan kelompok abangan. Dalam periode ini simbol-simbol kultur non-Islam dikonstruksi, disosialisasikan dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Simbol-simbol kebudayaan nasional dikonstruksi oleh pemerintah Orde Baru dengan mengambil warisan dari nilai-nilai kebudayaan Hindu. Hal ini berdasar sebuah pendapat yang populer di kalangan abangan

bahwa negara dan bangsa Indonesia bisa terbentuk karena adanya prestasi yang dicapai oleh pemerintah Hindu Majapahit di masa lalu. Dengan demikian, candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan serta yang lainnya, kendati tidak berarti jumlahnya dibandingkan dengan jumlah masjid yang bersejarah, sering disebut-disebut sebagai warisan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Presiden Soekarno dan Soeharto, sebagai tokoh abangan Jawa, mengabadikan bayangan kejayaan masa lalu ini melalui penggunaan istilah-istilah Hindu sebagai nama dari simbol-simbol nasional yang penting: Lima dasar negara dinamai Pancasila, kesatuan dan keragaman Indonesia diistilahkan Bhineka Tunggal Ika, istana kepresidenan diberi nama Bina Graha, doktrin untuk pendidikan Pancasila disebut Eka Prasetya Pancakarsa, sepuluh doktrin militer disebut Sapta Marga, dan seterusnya.

Dalam periode yang sama istilah-istilah yang populer tentang kelompok santri adalah hal-hal yang buruk, negatif dan terbelakang. Misalnya, sebutan "*santri budug*," "Islam kampung" dan lain-lain. Istilah-istilah ini cukup populer di kalangan

kelompok abangan yang dulu dikenal oleh pemerintah kolonial. Sampai akhir tahun 1970an, orang Islam yang melakukan shalat lima waktu di kantor-kantor disebut “unta Arab,” sebuah ungkapan yang sangat merendahkan. Kelompok Muslim yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan politik Islam, dicap dan disebut sebagai pendukung DI (Darul Islam) yang saat itu istilah tersebut menimbulkan Islam-phobia bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Tuntutan untuk menjalankan hukum Islam di lingkungan para penganutnya selalu dicurigai sebagai upaya mendirikan negara Islam.

Tahun 1985, pemerintah mengeluarkan larangan pemakaian kerudung bagi pelajar Muslim di sekolah-sekolah. Pemakaian busana muslimah di sekolah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang seragam sekolah. Peraturan ini kemudian menuai sejumlah protes dan demonstrasi. Pemerintah dianggap telah melakukan pelanggaran hak azasi dan nyata-nyata bersikap anti-Islam. Pendeknya, saat kelompok abangan menunjukkan supremasi kekuasaannya dalam politik Indonesia, hal-hal yang menunjukkan komitmen keislaman selalu mendapat klaim-klaim seperti “kampungan,” “gerakan ekstrem,” “ekstrimis kanan,” “anti-nasionalisme,” “anti-Pancasila,” “merongrong kewibawaan pemerintah,” dan sebagainya.

Namun, pada saat yang sama di sisi lain, sejak tahun 1980an, proses Islamisasi juga terus berlangsung diantara para pejabat pemerintah dan terutama di kalangan kelas menengah terdidik. Transformasi pendidikan dan pembangunan ekonomi mulai memunculkan sebuah kelas baru yaitu kelompok kelas menengah kota. Sebagian besarnya adalah kaum santri yang dulu berada di pedesaan. Kemunculan kelas menengah santri ini diiringi pula oleh pembentukan simbol-simbol santri baru. Sejak itu, Islam Indonesia memasuki sebuah era baru yaitu lingkungan simbolik yang bernuansa Islam (*a new environment of Islamic symbols*). Melalui perjalanan waktu, dan sebagai sebuah proses yang tidak terbandung, simbol-simbol religiusitas baru

mulai muncul, terbentuk dan mulai mendominasi kultur nasional, dengan kelas menengah sebagai motornya.

Para perintis pembentukan lingkungan simbolik Islam baru di kalangan artis misalnya adalah Ida Royani. Ida adalah seorang artis senior dan penyanyi terkenal, mulai memakai kerudung sejak tahun 1978 dan membuka bisnis butik busana Muslimah di Cinere Mall yang mewah di Jakarta, busana yang sebelumnya dikesani hanya pakaian perempuan pedesaan di kampung-kampung. Butik Ida Royani dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari kalangan kelas menengah ke atas. Harganya – jauh sebelum krisis moneter melanda tahun 1997-- berkisar diantara Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000. Ida Leman dan Nani Wijaya (artis) dan Anne Rufaidah (disainer busana) juga mulai memakai kerudung dan bersama Ida Royani mendirikan Yayasan Karima yang bergerak dalam bisnis busana Muslimah kelas atas (*Majalah Umat*, 30 Oktober 1995). Sitoresmi Prabuningrat, mantan istri sastrawan W.S. Rendra, mulai mengenakan kerudung dan menjadi *mubalighah* selain juga mendirikan bisnis busana Muslimah. Neno Warisman, artis populer, juga mulai memakai kerudung dan sering tampil di televisi saat itu ketika pemakaian busana Muslimah di kalangan artis belum terlalu populer. Dewi Motik Pramono, lulusan Florida Internasional University, Amerika Serikat, saat itu mengetuai IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dan mengontrol sekitar 3.500 perusahaan dibawah perusahaannya DeMono, mulai mengenakan kerudung sepulangnya dari ibadah haji ke Mekkah tahun 1997.

Beberapa orang contoh perempuan kelas menengah itu baru sedikit saja dari yang tersebar di kantor-kantor pemerintah, pebisnis-pebisnis swasta, kalangan perguruan tinggi, kelompok-kelompok profesional dan sebagainya. Contoh beberapa orang sukses itu penting disebut mengingat kesan busana Muslimah atau kerudung tidak lama sebelum itu sangat desawi dan simbol dari keterbelakangan. Yang memakainya hanya orang-orang pesantren dan guru-guru

agama di pedesaan serta guru-guru di madrasah. Sajian kesan “desawi” itu, tahun 1970an dan awal 1980an, pemakaian kerudung memang masih sangat jarang ditemukan di wilayah kota-kota besar. Bila pun ada tak jarang dikaitkan dengan istilah-istilah yang tak enak di dengar seperti “fundamentalisme Islam” atau “kelompok fanatik.” Tahun 1980an di Bandung, para gadis dan pelajar yang memakai kerudung sering disindir sebagai “gadis ninja,” “Ibu Haji,” dan lainnya yang nadanya merendahkan.

Pada Oktober 1987, Nurcholish Madjid mendirikan klub kajian agama untuk konsumsi kelas menengah yaitu Yayasan Paramadina. *Paramadina* artinya “agama yang unggul” (Islam), diambil dari akar kata *parama* (sanksekerta) artinya unggul, super, dan *din* (Arab) artinya agama. Pengajian kelompok ini diselenggarakan ditempat yang sangat tidak lazim bagi sebuah pengajian yaitu di Hotel Sari Pasifik, Lt. 6, Jakarta. Idenya datangnya dari beberapa orang kalangan kelas menengah yaitu pengusaha Ir. Ahmad Ganis (Direktur PT. Radiant Utama), pengusaha Drs. Abdul Latif (Direktur Sarinah Jaya dan kemudian diangkat jadi Menteri Tenaga Kerja beberapa tahun kemudian), dan cendekiawan Dawam Rahardjo (Mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES)). Yang diundang saat itu sungguh tidak biasa untuk sebuah pengajian yaitu adalah para petinggi Pemerintahan Orde Baru: Dr. Emil Salim (Menteri Lingkungan Hidup), Dr. Abdul Gafur (Menteri Urusan Pemuda dan Olah Raga), Munawir Sadzali, MA (Menteri Agama), Alamsjah Ratuperwira Negara (Menteri Kesejahteraan Umum). Pengajian pertama terekrut 400 orang anggota, pada pertemuan kedua menjadi 600 orang yang terdiri kaum profesional, intelektual dan para pejabat tinggi pemerintahan. Tujuan pengajian itu adalah untuk pendalaman pemahaman agama. Menurut Cak Nur saat itu, baru Paramadina di Indonesia yang memiliki program seperti itu bahkan bila dibandingkan dengan di Amerika Serikat dan

Mesir (*Tempo*, 3 Januari 1987). Setelah Paramadina, kemudian bermunculanlah grup-grup pengajian elit serupa yang menyelenggarakan acaranya di hotel-hotel berbintang, kantor-kantor mewah dan tempat-tempat bergengsi lainnya yang materi-materi pengajiannya adalah bertujuan mendalami tasawuf (sufisme Islam), filsafat Islam, hukum Islam, pendidikan Islam dan sebagainya.

Pada tahun 1990, umat Islam menyelenggarakan sebuah program cukup kolosal yaitu Festival Istiqlal, diselenggarakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Pesta ini adalah pesta budaya rakyat bernafaskan Islam. Melihat antusiasme masyarakat, festival kedua diselenggarakan lagi pada bulan September-Oktober 1995. Festival ini tidak hanya untuk mengungkapkan warisan budaya Islam Indonesia melalui program-program seperti pameran kaligrafi Islam, arsitektur Islam, *art design* dan karya-karya intelektual, tapi juga menampilkan perkembangan Islam mutakhir dan isu-isu Islam Indonesia kontemporer dan beberapa negara Asia Tenggara. Tujuan acara ini ingin menunjukkan bahwa warisan kebudayaan Islam di Indonesia sangat melimpah dan kayak sekali. Juga dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana Islam telah melandasi kebudayaan Indonesia modern terutama dalam arsitektur, seni, tradisi ilmu, sejarah dan seterusnya. Festival ini disambut luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Dalam dua bulan, 5 sampai 6 juta orang datang berkunjung ke Jakarta menghadiri acara ini. Mereka datang dari berbagai kota di Indonesia: Medan, Ujung Pandang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung dan yang lainnya.

Tahun 1990an, istilah “*ijo royo-royo*” dan “penghijauan” di DPR/MPR dipopulerkan oleh majalah *Tempo*. Dua istilah berkembang menjadi bagian dari wacana politik nasional dan banyak disebut karena kedua istilah itu menggambarkan apa yang sedang berlangsung secara masif dalam medan politik yaitu meningkatnya jumlah santri yang diangkat menjadi anggota

DPR/MPR tersebut. Douglas Ramage (1995: 100) menggambarkan:

Kabinet yang diumumkan oleh Soeharto pada bulan Maret 1993 secara luas merepresentasikan perimbangan afiliasi agama secara nasional dan hal itu nampaknya dilakukan dalam rangka merespon tuntutan kalangan Islam tentang perwakilan yang tidak seimbang (*overrepresentation*) dimana sebelumnya susunan kabinet lebih banyak dikuasai non-Muslim. Lebih dari empat puluh posisi kabinet diduduki kalangan Kristen dan satu oleh Hindu.

Pada tanggal 6 Desember 1990, diselenggarakan simposium nasional yang gegap gempita di Malang, Jawa Timur. Dengan motto: "Membangun Masyarakat Indonesia pada Abad ke-21," simposium tersebut dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh wakil presiden Soedharmono. Pertemuan besar itu bertujuan mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie terpilih sebagai ketua umum untuk periode lima tahun. Simposium itu dihadiri oleh 500 sarjana Muslim, intelektual, akademisi, ilmuwan dan sejenisnya, yang menghabiskan dana 500 juta (*Tempo*, 8 Desember 1990).

Pada tahun 1990an, Presiden Soeharto menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Iwan Fals mempopulerkan lagu Kantata Takwa sebuah lagu dengan gabungan musik antara rock, pop dan kasidah. Penampilan di Senayan Jakarta itu dihadiri ribuan pemuda yang menyeru kepada keadilan sosial dan membebaskan kemiskinan. Musik religius kasidah Bimbo yang mendorong ketaatan pada agama dan mengangkat indahnya spiritualitas dalam musik modern, ditampilkan stasiun-stasiun televisi setiap menjelang bulan Ramadhan dan hari-hari besar-besar Islam sepanjang tahun 1990an. Setelah masuk Islam, W.S. Rendra bersama-sama dengan KH. Zainuddin MZ, Setiawan Jodi dan Iwan Fals mendirikan Yayasan Gua Hira yang tujuannya

melakukan dakwah melalui seni dan pendidikan. Diiringi figur populer Emha Ainun Nadjib dan grupnya, Presiden Soeharto bertakbiran bersama rakyat Jakarta dan disaksikan oleh jutaan mata yang menyaksikan lewat televisi. Banyak orang berpendapat pemandangan seperti itu tak terbayangkan sebelum tahun 1990an.

Apakah artinya semua itu? Lebih dari sekadar munculnya kecenderungan tren kembali pada agama meningkat atau religiusitas yang menemukan tempatnya dalam hati masyarakat Indonesia, fenomena itu sesungguhnya menunjukkan sedang terjadinya revolusi simbolik baru melalui kehadiran kelas menengah Muslim Indonesia yang sedang mewarnai kebudayaan nasional dengan warna dan nafas Islam. Revolusi simbolik itu adalah menguatkan simbol-simbol kaum santri yang secara perlahan sedang menggantikan dominasi simbol-simbol hegemoni kaum abangan dalam jagat politik Indonesia. Perkembangan politik tahun 1980an menyediakan basis bagi kaum santri dalam menciptakan lingkungan simbolik baru tersebut. Terciptanya lingkungan simbolik baru di kalangan kelas menengah ke atas tersebut karena proses santrinisasi yang terjadi pada kaum abangan. Kuatnya proses kembali pada agama membuat ekspresi kebudayaan kejawaan semakin surut dan berkurang dan kemudian beralih kepada simbol-simbol kultur santri. Dengan demikian, gong kematian dominasi kelompok abangan Jawa sudah terjadi dalam politik Indonesia. Secara politik Indonesia modern semakin terbuka dan demokratis. Dengan demikian, sejak 1990an dikotomi santri-abangan sudah tidak lagi relevan dalam menganalisis kontes politik Islam dan negara di Indonesia. Proses santrinisasi yang kemudian membentuk lingkungan simbolik baru telah mengaburkan distingsi kultural antara santri dan abangan. Yang muncul sekarang adalah sebuah generasi kelas menengah Islam yang sedang mencari bentuk peranan baru dalam dunia global yang diwarnai perubahan sosial serba cepat, sebuah dunia era informasi dimana sekat-

sekat pembatas antar budaya, masyarakat, bangsa dan negara sudah semakin buyar.

Memasuki milenium baru, sejak tahun 2000, situasi sudah jauh lagi berbeda. Pemerintahan dan sistem politik sudah semakin demokratis, kelas menengah Muslim sudah semakin terdiferensiasi ke berbagai aspek kehidupan yang lebih luas lagi, akan sulit mengidentifikasi mereka secara kelompok dan formal. Wacana dikotomi santri-abangan kini sudah benar-benar hilang. Demokrasi membuat politik masyarakat muncul dengan aspirasinya yang lebih *genuine*. Simbol-simbol Islam sudah tidak lagi mengelompok dalam satu komunitas eksklusif. Partai-partai Islam kini bermunculan lagi, aspirasi syariat Islam bebas diperjuangkan, kelas menengah menyebar di berbagai kelompok dan kekuatan politik. Kontes politik sudah bergeser dari *afiliasi tradisional* (santri-abangan) kepada *afiliasi rasional* (aspirasi murni). Dalam komunitas internal umat Islam, *afiliasi rasional* telah memunculkan sebuah bentuk kompetisi baru yaitu kontes antara kelompok Islam liberal yang sekuler, pluralis dan inklusif dengan kelompok fundamental yang eksklusif, *concern* pada simbol-simbol Islam dan formalistis. *Now Islam is everywhere!* dan spesies kelas menengah berperan signifikan dibalik semua perubahan ini. Mereka tetap hidup, bergerak dan bekerja. Mereka hidup sebagai pekerja seni, pemikir dalam kelompok studi, pengusaha dalam kelompok ekonomi, penentu dalam kebijakan publik, kelompok strategis dalam medan politik, sebagai lapisan elit dalam komunitas Islam sendiri, dan seterusnya. Dalam komunitas umat, mereka menjadi penggerak dan inisiator dalam kelompok liberal dan sekuler tapi mereka juga hidup dan menjadi penjaga kelompok formal dan radikal. Mengenali sosoknya lebih dekat dari simbol-simbol kulturalnya adalah sebuah studi yang menarik.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif memfokuskan telaaahnya pada

makna-makna subyektif, pengertian-pengertian, metafor-metafor, simbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi ihwal suatu kasus spesifik yang hendak diteliti (Alvesson, M., & Sköldbberg, K., 2017). Pendekatan ini dipilih agar studi ini memperoleh gambaran detail dan mendalam mengenai suatu gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis (Ormston, R., Spencer, L., Barnard, M., & Snape, D., 2014). Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan rincian-rincian spesifik dari situasi, *setting* atau relasi-relasi sosial yang berlangsung dalam lingkup subyek penelitian (Patton, 2002).

Dalam penelitian ini, para peneliti menempatkan diri sebagai *the insider* yang berusaha sejauh mungkin melakukan empati (atau memproyeksikan diri dalam peran dan persepsi obyek yang diteliti) agar bisa sebaik mungkin merefleksikan penghayatan subyektif dari obyek yang diteliti (Yilmaz, K., 2013). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Melalui metode studi kasus, pemaparan yang akan dikemukakan dalam hasil penelitian tidak lain merupakan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian dilakukan dan pemaparan hasil penelitian akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang ada (Schmidt, F. L., & Hunter, J. E., 2014).

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

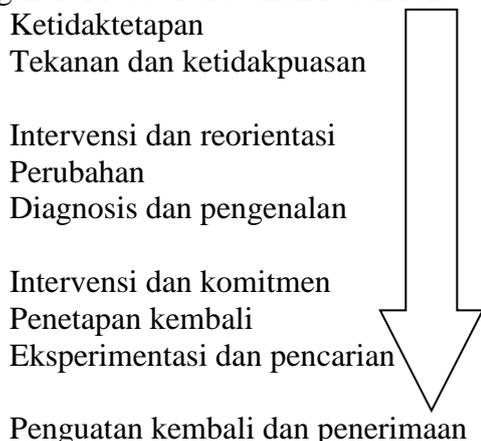
Pada mulanya pesantren memang institusi pendidikan tradisional. Demikian karena di pesantren itulah ajaran-ajaran Islam yang berdasarkan kitab-kitab klasik diajarkan. Tradisionalisme pesantren semakin nampak apabila dipertentangkan dengan sekolah yang relatif lebih maju karena memakai cara-cara modern. Dan pesantren pun masih nampak tradisional jika dibandingkan dengan madrasah, model sekolah Islam, yang juga modern.

Dengan adanya sekolah dan madrasah, secara praktis pesantren sudah tertantang. Masyarakat Islam di Indonesia sudah punya pilihan lain selain pesantren. Terhadap tantangan ini sebagian pesantren

mencoba menyesuaikan diri. Antara lain dengan memasukkan sistem pembelajaran formal seperti yang dilakukan di sekolah dan madrasah. Sistem kiai yang bersifat kharismatik pun menyesuaikan diri dengan sistem guru kolektif. Kepemilikan pesantren yang dulunya bersifat individual dan kekeluargaan, kini berubah menjadi kolektif dan terbuka, yaitu berbentuk yayasan. Untuk hal ini, penilaian dari Weber (1968) bisa masuk, yaitu terjadinya transformasi dari yang dominasinya kepemimpinan karismatik ke arah yang lebih demokratis. Tentang transformasi karismatik ke demokratis ini dikonfirmasi oleh kajian Epley (2015) yang menyimpulkan dari laporan Hefner (2000: 92) mengenai KH. Abdurrahman Wahid yang mengubah organisasi Nahdlatul Ulama (NU), “transforming it from a simple vehicle of ulama representation into an agent of grassroots development and pluralist democracy”.

Begitulah maka teori dari Huse (1979) mengenai proses perubahan suatu organisasi bisa mendapat tempat di pesantren. Yaitu bahwa perubahan itu terjadi setelah disadari adanya ketidaktetapan yang menimbulkan fenomena tekanan dan ketidakpuasan, yang kemudian menimbulkan intervensi dan reorientasi. Maka, dalam rangka perubahan, diagnosis dan pengenalan kepada hal yang baru yang disertai dengan intervensi dan komitmen pun terjadi. Dari situ dapatlah dibuat fase penetapan kembali dengan membuat percobaan dan pencarian sesuatu yang baru disertai dengan penguatan kembali dan penerimaan.

Bagan 1. Proses Perubahan Pesantren



Sumber: Huse, 1979.

Teori perubahan dari Huse (1979) di atas hampir sama dengan teori A-G-I-L (*Adaptation - Goal attainment - Integration - Latent pattern maintenance*) dari Parsons (1963) dan Poloma (1979). Karena memang ada proses adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola lama. Proses adaptasi terhadap modernitas dan pembangunan memang tengah berlangsung di pesantren-pesantren. Pesantren yang dulunya hanya satu jenis, yaitu *salafi* (tradisional) saja, kini sudah menjadi tiga jenis, yaitu dengan tambahan jenis *khalafi* (modern) dan campuran (kombinasi). Nampak pula bahwa pesantren *salafi* jumlahnya semakin sedikit dan jenis kombinasi semakin banyak.

Nampaklah bahwa zaman tengah berubah. Hal itupun dialami pesantren. Pesantren-pesantren yang masih kukuh untuk mengambil jalan tradisional pun tengah mengalami modernisasi, baik dari segi kurikulum, legalitas, maupun penggunaan teknologi modern seperti komputer bahkan radio. Demikianlah, perubahan pada pesantren merupakan suatu perubahan yang bersifat sistemik. Artinya, perubahan satu hal akan mengubah pada hal lainnya. Albrecht (1978) mengemukakan bahwa empat sistem utama dalam suatu organisasi, yaitu sistem teknik, sistem sosial, sistem administrasi, dan sistem strategis akan saling mengoreksi diri. Proses perubahan yang serentak itu memang terjadi di pesantren.

Perubahan (transformasi) yang terjadi pada pesantren adalah pesantren memperbaiki dirinya menjadi modern. Dan kemodernan yang merupakan kehendak merubah dari kejumudan menuju kemajuan itu merupakan tuntutan masyarakat (*social demand*) (Korten & Alfonso, 1981). Kajian menemukan bahwa pihak orang tua santri sebagai pelanggan (*customer*) dari pesantren sudah menuntut bahwa pesantren mestilah memberikan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh individu-individu modern. Demikian karena dunia industri seperti sekarang menuntut jenis manusia lain yang mesti dikeluarkan

oleh institusi pendidikan (Toffler, 1970). Di antara ilmu-ilmu yang dituntut oleh masyarakat untuk diadakan oleh pihak pesantren adalah ilmu-ilmu bahasa internasional seperti Arab dan Inggris dan ilmu-ilmu praktis untuk bekal hidup sehabis keluar dari pesantren.

Memang belum semua pesantren sedia untuk segera melakukan pembenahan diri dan persiapan untuk menjadi modern. Sebab selalu saja ada rintangan-rintangan untuk mewujudkannya, di antaranya adalah letaknya yang berada jauh di perdesaan, lingkungan yang masih saja diliputi budaya agraria, manajemen pesantren masih bersifat kekeluargaan, teknologi yang belum berkembang, dan sebagainya. Tetapi bahwa pesantren mesti menjawab tuntutan masyarakat tadi jika hendak melanggengkan dirinya sebagai pusat kegiatan komunitas adalah juga kenyataan yang tak boleh disangkal. Sebab, jika pesantren tidak mengikuti kehendak masyarakat untuk mengikuti kemajuan, pesantren akan ditinggalkan orang, dan cerita pesantren hanyalah sebagai cerita masa lalu. *Trend* masyarakat sekarang menuntut bahwa pesantren bukan hanya berpenampilan desa, tetapi juga siap sedia untuk berpenampilan kota. Sebab, di belahan dunia lain pun, modernisasi, termasuk modernisasi sistem pendidikan, itu dilegitimasi sebagai perangkat untuk memperkuat umat Islam itu sendiri (Sikand dalam Noor, et.al., 2008).

Penanaman karakter Islam adalah sesuatu yang sudah *given* bagi pesantren. Namun, bagaimana jika pesantren pun memicu jiwa *community development* pada diri santrinya? Di situlah keunikannya. Penanaman karakter yang terakhir ini dapat dilihat dalam sedikit cerita penulis dalam penelitian di Bandung Barat, Sukabumi dan Tasikmalaya (Juli-Agustus 2016) berikut ini.

Penanaman karakter pada anak bukanlah hal yang baru. Setiap orang tua di segala zaman selalu menanamkan karakter pada anaknya. Demikian karena hidup tanpa karakter berarti hidup tanpa tujuan, tanpa ruh, dan tanpa semangat. Karakter sebagai modal psiko-mental, dengan demikian, harus

diturunkan kepada anak sejalan dengan menurunkan kemampuan mereka untuk terus hidup. Itulah yang selalu dilakukan oleh para orang tua.

Secara umum kita bisa katakan bahwa teori-teori penanaman karakter yang sesuai dengan kehendak masyarakat, atau apa yang disebut sosialisasi sangatlah bertaburan. Misalnya, ada teori yang menumpukan perhatian pada beberapa hal seperti melihat perkembangan kognitif (seperti Piaget), penanaman moral dan identitas personal melalui hubungan kekeluargaan (seperti Freud), penerapan kategori moral dan nilai (seperti Durkheim), konsep diri dan identitas sosial (seperti Mead), dan perkembangan keterampilan sosial yang membuat keberhasilan interaksi, terutama dalam komunikasi linguistik (seperti Bernstein).

Memang, secara sosiologis, karena kita berkembang dan bermasyarakat, di masyarakat kita muncul pembagian tugas (*division of labor*), misalnya dengan adanya tenaga yang mengajarkan kemampuan dan karakter kepada generasi muda. Mereka dikenal dengan guru, ustadz, tutor, dan sebagainya. Dan mereka tidak hanya mengajar dari rumah ke rumah, atau di rumah mereka, atau di tempat ibadah. Mereka pun mempunyai lembaga pendidikan (Rahman, 2011).

Maka, kepada guru-guru di lembaga-lembaga pendidikan itulah tiap-tiap keluarga menitipkan anak-anaknya untuk dididik. Di situlah karakter pun ditempa dan ditanamkan, yang kemudian tumbuh dan berkembang. Demikian karena di lembaga-lembaga pendidikan itulah generasi muda kita diasuh, dididik, bahkan menghabiskan usia persekolahan mereka. Harapan masyarakat terhadap lulusan pesantren, yang pada umumnya disuarakan oleh orang tua santri, haruslah memiliki akhlak yang mulia (*akhlaqul karimah*), memiliki keilmuan agama yang teguh (*tafaquh fiddin*), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan memiliki keterampilan (Wawancara dengan MZ, orang tua santri dari SMP Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya, 17 Agustus 2016).

Harapan bahwa santri mesti mempunyai kemahiran hidup seperti disebutkan di atas barangkali bisa saja dipenuhi dengan menitipkan anak ke pesantren manapun, karena hampir semua pesantren memberi pelajaran kemahiran hidup. Yang berbeda adalah bahwa pesantren tradisional masihlah hanya memberikan kemahiran hidup yang bersifat agraris, pertanian saja. Sementara itu, perkembangan zaman memerlukan kemahiran hidup yang lain. Sebagian orang tua sudah tidak percaya lagi kepada pesantren tradisional untuk mendidik anaknya. Mereka menginginkan lebih, yaitu perubahan nasib dari petani ke profesi yang lain (Wawancara dengan UD, orang tua santri dari SMP Serba Bhakti Ponpes Suryalaya, Tasikmalaya).

Pesantren yang mempunyai program pendidikan formal, sehingga mempunyai ijazah yang diakui oleh perguruan tinggi adalah sesuatu yang diperlukan oleh orang tua yang berpandangan modern. Sebab tanpa bisa meneruskan sekolah, pesantren dianggap hanyalah akan mematikan bakat anak (Wawancara dengan AS, orang tua santri dari SMP Amanah, Kota Tasikmalaya, 16 Agustus 2016).

Perkembangan selanjutnya adalah Kemdikbud dan Kemenag membantu proses modernisasi pesantren. Kemdikbud dan Kemenag menawarkan pihak pesantren sistem sekolah dan madrasah mereka untuk dijadikan tolak ukur pendidikan. Sekolah dan madrasah itu pun mengeluarkan ijazah yang dapat dipakai oleh lulusannya untuk mencari pekerjaan (Wawancara dengan CC, Pengawas Sekolah di Tasikmalaya, 18 Agustus 2016). Untuk mendapat ijazah tersebut, pihak pesantren mau tidak mau mesti menerima 100 persen semua kurikulum yang dijadikan standard. Bagi pesantren-pesantren yang mempunyai sekolah atau madrasah, mata pelajaran yang bersifat kepesantrenan hanyalah disampaikan ketika di luar waktu sekolah. Dalam kenyataannya, kemudian, banyak pesantren yang mengadakan sekolah seperti SMP, SMA dan SMK. Setidaknya begitulah pengakuan Kyai FZ dari Al-Masthuriyah, Kab. Sukabumi.

Menurutnya, pesantren semakin ramai dan bergairah setelah adanya sekolah-sekolah; yang terakhir dengan didirikannya SMP yang mendapatkan pembinaan Kemdikbud. Hal itupun diakui oleh Ust. MA, Wakasek SMP Al-Syafi'iyah di kabupaten yang sama. Menurut beliau, "para orang tua, terutama yang datang dari Jakarta, menuntut pembukaan sekolah di pesantren ini" (Wawancara dengan MA, 12 Juli 2016).

Sekolah berbasis pesantren memang sudah banyak berkembang tumbuh di masyarakat. Hal itu kebanyakannya merupakan respon pihak pesantren dan masyarakat pada umumnya atas perkembangan zaman yang menuntut diapresiasi ilmu-ilmu kemodernan. Namun, apresiasi itu tentu berbeda-beda dari segi pelaksanaannya. Demikian karena pihak pesantren pun berbeda-beda dari segi kemampuan dan resepsinya atas pendidikan model sekolah. Dari sini muncullah respon dari pihak pemerintah. Bagi mensukseskan pendidikan tersebut Kemdikbud dan Kemenag membantu memberikan fasilitas pendidikan seperti buku-buku, laboratorium, dan bangunan. Bantuan pemerintah tersebut memang diperlukan oleh pesantren-pesantren yang menyelenggarakan sekolah atau madrasah. Namun ada di antara pihak pesantren yang tidak mau menerima bantuan tersebut dengan alasan-alasan tertentu.

Dalam apresiasinya terhadap pesantren yang mendirikan sekolah, pihak pemerintah telah melakukan kajian dan menyiapkan berbagai macam proyek untuk membantu kelancaran sekolah berbasis pesantren. Pemerintah (Kemdikbud, 2012) mengakui bahwa Sekolah Berbasis Pesantren (SBP) adalah sekolah yang mengintegrasikan keunggulan sistem pendidikan sekolah dan pesantren. Pada tataran implementasinya, SBP menitikberatkan pada: (a) peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta kemandirian dalam hidup (b) pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan. Pilihan memadukan sistem sekolah dan Pesantren ini diambil setelah melihat dan mengamati secara seksama mutu pendidikan yang dilahirkan oleh masing-masing sistem.

Secara umum, pesantren dan sekolah merupakan dua satuan pendidikan yang masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda satu sama lain. Bila mereka berjalan sendiri-sendiri, ada potensi dan kekuatan pendidikan yang pemanfaatannya kurang optimal. Namun bila kedua unggulan itu dapat disatukan, maka akan lahir sebuah kekuatan pendidikan yang komprehensif untuk melahirkan anak Indonesia yang unggul.

Kemdikbud (2012) menilai keunggulan yang dikembangkan dalam SBP adalah nilai-nilai keunggulan yang dimiliki oleh sistem pesantren dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem persekolahan. Nilai unggul yang dimiliki sistem pesantren adalah kekuatannya dalam pengembangan akhlak mulia dan pembinaan kepribadian, sedangkan nilai unggul yang dimiliki sistem sekolah adalah kekuatannya dalam pengembangan mutu akademis. Hal ini diakui oleh Kyai BQ dari Pesantren Darul Falah, Cihampelas, Bandung Barat. Menurutnya, setelah adanya sekolah, pesantren menjadi lebih maju, sehingga penduduk sekitar pun akhirnya banyak yang menyekolahkan anaknya ke pesantren tersebut, karena banyaknya anak yang mesantren dari luar daerah. “Akhirnya,” demikian Kyai BQ, “pesantren pun membuka SMP yang kedua, khusus untuk para penduduk sekitar” (Wawancara dengan BQ, kyai pesantren di Bandung Barat, 18 Juli 2016).

Untuk mendorong pencapaian tujuan yang diharapkan, berbagai langkah telah diambil dalam bentuk bantuan pemenuhan ketersediaan sumber daya pendidikan, seperti bantuan pembangunan RKB dan ruang belajar lainnya, alat pembelajaran, workshop pengembangan KTSP, bantuan pembinaan SBP, bantuan pengembangan SBP. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan lima misi Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu (5 K). Demikianlah sehingga, diakui oleh

Pemimpin Pesantren Al-Fattah, Gunung Halu, Bandung Barat, bahwa dengan berdirinya sekolah di pesantrennya, apalagi banyak kegiatannya, santri-santri semakin banyak yang datang dan bermukim di pesantren. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tujuan dunia (yaitu pandai untuk hidup *survival*) dan tujuan akhirat (yaitu memahami ilmu agama) yang dilaksanakan secara bersamaan di pesantren tersebut (Wawancara dengan SD, kyai pesantren di Bandung Barat, 18 Juli 2016).

Selain kemahiran keagamaan, kemahiran yang bersifat keduniaan seperti kemahiran vokasi, kewirausahaan dan teknologi pun dipelajari dan diajarkan di pesantren. Yang membedakannya adalah tujuan dari pesantren itu sendiri. Pesantren-pesantren tradisional seperti Miftahul Huda dan Asy-Syahidiyah di Tasikmalaya menjalankan program yang bersifat pertanian, penternakan, perkebunan, dan pertukangan. Di pesantren-pesantren tersebut selalu diadakan latihan (*workshop*) dan bekerja terus di ladang (magang). Oleh karena itu, gaya pendidikannya adalah belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

Metode belajar secara praktis pun dilakukan dalam bidang kewirausahaan. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi tersebut dijalankan agar pondok pesantren mempunyai kegiatan yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya (Mustari & Rahman, 2010). Kegiatan produktif yang diselenggarakan oleh pesantren meliputi koperasi, Wartel (warung telekomunikasi), usaha dalam bidang agrobisnis (jual beli hasil pertanian), dan perdagangan umum. Bagi keseluruhan kegiatan tersebut, santri-santri dilibatkan untuk belajar mengurusnya (Wawancara dengan WW, santri senior di Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, 17 Agustus 2016).

Begitu juga dengan kemahiran teknologi. Teknologi yang ada seperti komputer diperkenalkan kepada para santri untuk dipelajari walaupun dilakukan secara bergiliran. Skenario ini demikian karena kekurangan fasilitas teknologi di pesantren.

Keberadaan pendidikan keterampilan di pesantren-pesantren tradisional dan modern sesungguhnya merupakan pendidikan sampingan (ko-kurikulum). Yang berbeda adalah fokus kokurikulum tersebut. Misalnya, di pesantren-pesantren tradisional, kemahiran hidup yang ditawarkan kepada santri adalah kemahiran hidup di pedesaan seperti masalah pertanian. Sementara itu, di pesantren-pesantren modern, kemahiran hidup sudah mengarah kepada gaya profesionalisme hidup di perkotaan seperti latihan jurnalistik, kemahiran berbahasa Inggris, kemahiran berdebat dan retorika, dan lain-lain. Namun begitu, semua kemahiran hidup tersebut masih bersifat kokurikulum (Wawancara dengan YY, Kepala Sekolah SMP Al-Muttaqin, Kota Tasikmalaya, 16 Agustus 2016).

Kemudian, mengenai latihan keterampilan yang didukung pelaksanaannya oleh Kemdikbud, telah sangat membantu sekolah-sekolah. Berdasarkan wawancara langsung dengan para Kepala Sekolah dan tutor-tutor keterampilan di SMP-SMP Berbasis Pesantren Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, didapatkan bahwa program-program yang sudah diusulkan sebelumnya untuk Tahun 2015 itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di sekolah-sekolah. Para guru juga mengatakan bahwa keberadaan program pembinaan itu sangat membantu para guru dalam mengajar kepada para siswanya yang notabene sekaligus santri. Begitu pula, peralatan pendidikan itu sangat membantu para siswa dalam memahami dan menguasai pelajaran keterampilan, untuk menjadi bekal mereka kelak di kemudian hari.

Kondisi peralatan keterampilan masih bagus, masih dipakai, dan ditempatkan di gedung dengan baik. Secara umum, tidak ada kesulitan dari pihak sekolah dalam memanfaatkan peralatan Keterampilan Siswa Berbasis Pesantren dari Pemerintah Pusat Tahun 2015. Namun demikian, hampir kebanyakan keterampilan di SMP-SMP BP Kab. Sukabumi bersifat tata boga, kecuali SMP Az-Zainiyah yang bersifat tata busana. Dalam hal tata boga, kebanyakan lebih

terfokus pada kripik singkong, kecuali SMP Al-Masturiyah yang membuat produk berbahan jagung, yaitu emping jagung dan puding jagung. Kripik singkong yang diproduksi oleh SMP Al-Bashry dan SMP As-Syafi'iyah pun tidak mau ketinggalan di bidang kreativitas, mereka membuat kripik singkong berbagai rasa seperti rasa asin, rasa manis, rasa pedas, bahkan rasa keju. Khusus SMP Al-Bashry, anak-anak santri bisa pula memproduksi *cheese stick* (baca: sistik).

Namun, hampir semua pihak sekolah meminta pembinaan lain, terutama pelatihan guru-guru, latihan siswa, dan peralatan sekolah yang dapat memacu prestasi di bidang Matematika dan IPA. Dengan itu diharapkan akan dapat mengirimkan peserta ke olimpiade-olimpiade. Demikian itu karena peralatan keterampilan yang ada telah mampu membantu siswa dalam memperdalam dan memperluas wawasan pelajaran tentang kehidupan, terutama wirausaha. Untuk mereka yang berada di pedesaan atau di perkotaan yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung, hal ini dipandang sangat maju. Untuk itu, para kepala sekolah menginginkan program pembinaan dan keterampilan untuk siswa SMP berbasis pesantren ini untuk tetap dilanjutkan. Dan untuk tujuan ini subsidi dari Pemerintah Pusat sangat diharapkan.

Menurut para kepala sekolah SMP BP di Kabupaten Sukabumi, para siswa sangat bergairah ketika mereka belajar di luar kelas, yaitu misalnya dengan belajar keterampilan. Kegairahan seperti ini memang membuat mereka lebih bersemangat lagi dalam melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Mereka katakan, "seperti segar kembali." Pihak pengelola sekolah sendiri tidak mempunyai kendala dalam menjalankan semua aktivitas yang berhubungan dengan pembinaan SMP Berbasis Pesantren. Namun, ada hal-hal yang disarankan untuk kebaikan program tersebut di sekolah-sekolah SMP BP di Sukabumi, yaitu diantaranya:

- 1) Diperlukan program tingkat mahir untuk kelas VIII dan terampil untuk kelas IX. Demikian karena selama ini

hanya melakukan keterampilan tingkat dasar.

- 2) Supaya program pembinaan dilanjutkan karena hal itu membantu kemandirian pesantren dan kemampuan siswa untuk pada saatnya nanti terjun ke masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Diperlukan adanya pelatihan untuk para tutor, apabila ada perkembangan baru baik dalam produksi maupun pemasaran.
- 4) Diusulkan supaya ada pelatihan pertukangan untuk santri putera. Demikian karena keterampilan tata boga dan busana lebih ditekuni oleh santri puteri.
- 5) Diteruskan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memelihara kelangsungan pembinaan SMP Berbasis Pesantren, seperti dengan pihak Kemdikbud, Kementerian Agama, dan lain-lain atau melakukan terobosan baru dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian atau Perindustrian.

#### IV. Kesimpulan

Kaum santri di Indonesia telah menghargai nilai-nilai pendidikan dengan mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan posisi sosial yang lebih baik di masyarakat. Melalui transfer modal kultural ini, anak-anak modern memiliki sejumlah keistimewaan-keistimewaan sosial sehingga dapat memasuki lingkaran-lingkaran elit masyarakat walaupun dengan absennya kekayaan individu. Selain itu, terdapat pencarian ekspresi religius kelas menengah Muslim. Disebabkan proses sekularisasi yang kuat, mereka tidak menemukan kehidupan yang damai dan menentramkan dalam peradaban modern yang akhirnya mendorong mereka kembali pada nilai-nilai agama. Dua gerakan inilah yang disebut dengan Islamisasi.

Setelah berhasilnya Islamisasi ini kaum santri yang menjadi kelas menengah tersebut berlomba-lomba membantu lembaga

lembaga pendidikan agama seperti pesantren untuk mempunyai karakter tidak pantang menyerah, optimis, dan bekerja keras dalam menghadapi modernisasi di Indonesia. Di sini terjadi penggelontoran bantuan melalui berbagai kementerian, terutama kementerian agama. Hasilnya adalah bahwa pesantren tidak hanya mampu melahirkan ulama saja, malah bisa pula memunculkan orang yang mampu bekerja dalam berbagai bidang kehidupan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, Karl. (1978). *Successful Management by Objectives: An Action Manual*. New Jersey: Prentice-Hall Inc. & Englewood Cliffs.
- Alvesson, M., & Sköldböck, K. (2017). *Reflexive methodology: New vistas for qualitative research*. Sage.
- Epley, Jennifer L. (2015). "Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics," in *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 7; July 2015.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Culture*, Basicbooks, HarperCollins Publishers.
- Hefner, R. W. (2000). "Profiles in Pluralism: Religion and Politics in Indonesia" in Silk, M. (Ed.), *Religion on the International News Agenda*, Hartford, CT: The Leonard E. Greenberg Center for the Study of Religion in Public Life.
- Huse, Edgar F. (1979). *The Modern Manager*, New York: West Publishing Company.
- Kemdikbud. (2012). *Panduan Pelaksanaan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Pembinaan SMP Berbasis Pesantren*.
- Korten, David C. and Alfonso, Felipe B. (eds.). (1981). *Bureaucracy and the Poor: Closing the Gap*, Singapore: McGraw-Hill International Book

- Company, Copyright by Asian Institute of Management, Makatai, Metro Manila, Philippines.
- Mustari, Mohamad, and M. Taufik Rahman. (2010). *Peranan pesantren dalam pembangunan pendidikan masyarakat desa*. MultiPress.
- Ormston, R., Spencer, L., Barnard, M., & Snape, D. (2014). The foundations of qualitative research. *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*, 2, 52-55.
- Patton, Michael Quinn. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd edition, London: Sage Publications.
- Rahman, M. Taufiq. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Ramage, Douglas E. (1995). *Politics in Indonesia. Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, London and New York: Routledge.
- Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2014). *Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings*. Sage publications.
- Sikand, Yoginder. (2008). "Voices for Reform in Indian Madrasas," in Noor, Farish A.; Sikand, Yoginder; van Bruinessen, Martin; *The Madrasa in Asia: Political Activism and International Linkages*, Amsterdam: Amsterdam University Press & ISIM Series on Contemporary Muslim Societies.
- Tempo*, 3 Januari 1987.
- Tempo*, 8 Desember 1990.
- Toffler, Alvin. (1970). *Future Shock*. New York: Bantam Books.
- Ummat* No. 9 Thn. I, 30 Oktober 1995/Jumadil Akhir 1416H.
- Ummat*, 19 Februari 1996.
- Weber, Max. (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, Transl. and ed. G. Roth and C. Wittich, New York: Bedminster Press, [1921].
- Yilmaz, K. (2013). Comparison of quantitative and qualitative research traditions: Epistemological, theoretical, and methodological differences. *European Journal of Education*, 48(2), 311-325.